



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13611-13619

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Identifikasi Sektor Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menggunakan Studi *Location Quotient*

Nur Asmita Purnamasari

Universitas Mataram

Email: asmitapurnamasari@unram.ac.id

Abstrak

Ketidakseimbangan ekonomi antara kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Provinsi NTB tergolong memiliki pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun kesenjangan ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, upaya untuk menguranginya tetap penting. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menganalisis setiap wilayah di Provinsi NTB guna memberikan orientasi dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Sehingga pada penelitian ini dilakukan Analisis *Location Quotient* untuk mengklasifikasi masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan sektor lapangan usahanya sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam melakukan penyesuaian kebijakan Pembangunan demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: *PDRB, Location Quotient, Provinsi Nusa Tenggara Barat*

Abstract

Economic imbalance between regencies/cities in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) is a serious issue that requires attention. NTB province is characterized by low growth and GDP contribution compared to other provinces in Indonesia. Although this disparity cannot be entirely eliminated, efforts to reduce it remain important. One step that can be taken is to analyze each region in NTB to provide orientation in reducing this disparity. Therefore, this study conducts a Location Quotient analysis to classify each city/regency in the Province of West Nusa Tenggara based on their economic sectors. It is hoped that this analysis can serve as an alternative in adjusting development policies to improve community welfare.

Keywords: *GDP, Location Quotient, West Nusa Tenggara Province*

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi suatu daerah sangat berperan dalam proses pembangunan suatu daerah, karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Setiap daerah memiliki sektor unggulan dan tertinggal masing-masing sehingga perlu dilakukan identifikasi untuk memaksimalkan hal tersebut. Sehingga dibutuhkan model yang dapat digunakan sebagai perencanaan terkait kebijakan yang dilakukan dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan setiap sektor usaha di daerah tersebut (Tarigan, 2016).

Perbedaan potensi masing-masing sektor tersebut disebabkan oleh letak geografis, potensi sumber daya dan lain-lain. Sehingga, pelaksanaan pembangunan yang terencana dan berfokus pada pengurangan kesenjangan antar wilayah sangat penting dilakukan untuk mendukung upaya pemerataan di Indonesia.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu penduduk. Jika PDRB per kapita tinggi, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Sebaliknya, jika PDRB per kapita rendah, maka tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung lebih buruk.

Pada triwulan I-2022, wilayah-wilayah di Pulau Jawa memberikan kontribusi PDB sebesar 57,78%. Selanjutnya, Pulau Sumatera memberikan kontribusi sebesar 21,96%, diikuti oleh Pulau Kalimantan 8,29%, Pulau Sulawesi 6,73%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2,66%, serta Pulau Maluku dan Papua 2,58%.



Gambar 1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2022 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan Gambar 1, Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kategori dengan pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Meskipun kesenjangan ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, upaya untuk menguranginya tetap diperlukan, sehingga perlu dilakukan analisis setiap wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibutuhkan data dan informasi yang objektif untuk melakukan identifikasi tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan alternatif untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pertumbuhan. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mengelompokkan observasi baru ke dalam kelompok yang sudah ada (Johnson & Wichern, 2007). Proses pengklasifikasian ini dapat dilakukan dengan menggunakan studi *Location Quotient*.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan yaitu data PDRB Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022. Data ini diperoleh dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian dilakukan observasi dan studi pustaka. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat sehingga membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis dan non-basis, serta memberikan dasar yang kuat untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode Analisis

Location Quotient (LQ) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan peran suatu sektor suatu daerah dengan peran sektor yang sama di tingkat nasional (Tarigan, 2014). Menurut Hood (1998 dalam Hendayana 2003), LQ merupakan metode ekonomi yang sederhana, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Studi LQ merupakan metode ekonomi yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor-sektor yang termasuk dalam kategori basis. Studi ini sering diterapkan untuk menganalisis kondisi ekonomi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai potensi suatu daerah. Nilai LQ dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Jumiyanti, 2018):

$$LQ = \frac{V_i / V_t}{Y_i / Y_t}$$

Dimana

V_i : angka PDRB sektor i pada wilayah dengan tingkat yang lebih rendah

V_t : keseluruhan PDRB pada wilayah dengan tingkat yang lebih rendah

Y_i : angka PDRB sektor i pada wilayah dengan tingkat yang lebih tinggi

Y_t : keseluruhan PDRB pada wilayah dengan tingkat yang lebih tinggi

Nilai LQ dapat dimasukkan dalam tiga kategeori sebagai berikut:

- a. $LQ < 1$: Dikategorikan sebagai non-basis
- b. $LQ = 1$: Dikategorikan sebagai non-basis.
- c. $LQ > 1$: Dikategorikan sebagai basis atau sumber pertumbuhan.

(Astarsari, Ibrahim, dan Harpowo 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai macam sektor yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sektor-sektor yang digerakan dalam suatu kabupaten/kota, merupakan gambaran dari aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ sektor dapat diklasifikasikan menjadi sektor basis dan sektor non basis. Berikut adalah hasil perhitungan LQ pada setiap sektor di kabupaten/kota yang terletak di Provinsi NTB:

Tabel 1. Sektor usaha yang masuk dalam kategori basis (LQ >1)

SEKTOR	KOTA/KABUPATEN									
	Kota Mataram	Kab Lobar	Kab Loteng	Kab Lotim	KLU	Kab Sumbawa	KSB	Kab Dompu	Kota Bima	Kab Bima
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			✓	✓	✓	✓		✓		✓
Pertambangan dan Penggalian							✓			
Industri Pengolahan	✓		✓	✓						
Pengadaan Listrik dan Gas	✓				✓	✓				
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	✓		✓		✓					
Konstruksi			✓	✓		✓				
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓
Transportasi dan Pergudangan			✓						✓	✓
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					✓					
Informasi dan Komunikasi	✓									
Jasa Keuangan dan Asuransi	✓					✓				
Real Estat	✓		✓	✓	✓			✓	✓	
Jasa Perusahaan	✓				✓	✓		✓	✓	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓
Jasa Pendidikan	✓			✓	✓			✓	✓	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	✓		✓	✓					✓	
Jasa Lainnya	✓		✓		✓				✓	

Mengacu pada tabel 1, terlihat sektor-sektor usaha yang maju dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan. Sektor- sektor ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat namun juga menghasilkan surplus yang dapat diekspor ke luar wilayah. Dengan demikian, sektor-sektor ini mampu untuk menyumbang secara signifikan terhadap wilayah,

sehingga diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan fokus pada pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah.

Tabel 2. Sektor Usaha yang Masuk dalam Kategori Non Basis (LQ = 1)

SEKTOR	KOTA/KABUPATEN									
	Kota Mataram	Kab Lobar	Kab Loteng	Kab Lotim	KLU	Kab Sumbawa	KSB	Kab Dompu	Kota Bima	Kab Bima
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan										
Pertambangan dan Penggalan										
Industri Pengolahan										
Pengadaan Listrik dan Gas										
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang										
Konstruksi	✓									
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
Transportasi dan Pergudangan										
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum										
Informasi dan Komunikasi										
Jasa Keuangan dan Asuransi										
Real Estat										
Jasa Perusahaan										
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
Jasa Pendidikan										
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial										
Jasa Lainnya										

Mengacu pada Tabel 2, terlihat bahwa hanya ada satu sektor di Kota Mataram yang memiliki nilai LQ = 1, yaitu pada sektor konstruksi. Artinya produksi dari sektor ini cukup

untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi tidak menghasilkan surplus yang signifikan untuk diekspor ke luar wilayah.

Tabel 3. Sektor Usaha yang Masuk dalam Kategori Non Basis (LQ < 1)

SEKTOR	KOTA/KABUPATEN									
	Kota Mataram	Kab Lobar	Kab Loteng	Kab Lotim	KLU	Kab Sumbawa	KSB	Kab Dompu	Kota Bima	Kab Bima
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	✓	✓					✓		✓	
Pertambangan dan Penggalian	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Industri Pengolahan		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pengadaan Listrik dan Gas		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Konstruksi		✓			✓		✓	✓	✓	✓
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		✓	✓				✓			
Transportasi dan Pergudangan	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Informasi dan Komunikasi		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Jasa Keuangan dan Asuransi		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Real Estat		✓				✓	✓			✓
Jasa Perusahaan		✓	✓	✓			✓			✓
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		✓	✓				✓			
Jasa Pendidikan		✓	✓			✓				✓
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		✓			✓	✓		✓		✓
Jasa Lainnya		✓		✓		✓		✓		✓

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat dilihat hasil nilai LQ < 1 yang masuk dalam klasifikasi non basis, yang artinya produksi dari sektor ini tidak cukup memenuhi kebutuhan lokal,

sehingga wilayah tersebut harus mengimpor barang dan/atau jasa dari sektor ini dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun saat ini sektor-sektor tersebut tidak kuat, ada potensi untuk mengembangkan kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terutama pada Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut guna mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak sektor usaha yang perlu dioptimalkan khususnya di kabupaten Lombok Barat dan kabupaten Sumbawa Barat, dimana hampir seluruh sektor usahanya masuk dalam kategori non basis. Sektor usaha yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penyediaan akomodasi dan makanan-minuman karena pada semua kota/kabupaten sektor tersebut masuk dalam kategori non basis sehingga kebutuhan masyarakat dapat diatasi.

Hasil analisis metode LQ diatas dapat menjadi pertimbangan penting dalam upaya mengatasi keluhan masyarakat serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika keluhan masyarakat berkaitan dengan sektor basis, maka pemerintah perlu menganalisis pengelolaan sektor ekonomi tersebut, terutama dalam hal distribusi barang dan/atau jasa. Sebaliknya, jika keluhan masyarakat berhubungan dengan sektor non-basis, pemerintah dapat mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan sektor non-basis agar keluhan masyarakat dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astasari, Cynthia Paramita, Jabal Tarik Ibrahim, and Harpowo Harpowo. 2018. "Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Cabai Di Kabupaten Kediri." *Agriecobis : Journal of Agricultural Socioeconomics and Business* 1(2):11.
- BPS. 2023. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2022 No. 14/02/52/Th.XVII
- Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian* volume 12. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknoloho Pertanian Bogor. <https://www.litbangdeptan.go.id>
- Johnson, R., & Winchern, D. 2007., *Applied Multivariate Statistical Analysis (Sixth Ed ed.)*.

New Jersey: Prentice Hall

Jumiyanti, K.R. 2018. "Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo."Gorontalo Development Review

Tarigan, R. 2014. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi Cetakan Ketujuh. Bumi Aksara, Jakarta.

Tarigan, R. 2016 Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta.